

BAB II

DESKRIPSI TEORI

A. Kajian Teori

1. Manajemen Budaya Religius

a. Pengertian Manajemen Budaya Religius

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *manager* yang artinya menangani.³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah proses menggunakan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran.³⁷ Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah suatu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁸

Pengertian manajemen menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah

³⁶ Husaini Usman, 2006, *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke- 1, hlm. 3.

³⁷ Tim Penyusun, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 708

³⁸ Eka Prihatin, 2011, *Manajemen Peserta Didik*, Bandung:Alfabeta, hlm. 2

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” pengelolaan, sedangkan pelaksananya disebut dengan manager atau pengelola.³⁹ Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan atau seni. Dikatakan sebagai seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dengan kata lain seni merupakan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Beberapa pengertian tentang manajemen diatas dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal yaitu:

- 1) Manajemen merupakan suatu usaha atau tindakan ke arah pencapain tujuan melalui suatu proses.
- 2) Manajemen merupakan suatu sistem kerja sama dengan pembagian peran yang jelas
- 3) Manajemen melibatkan secara optimal sumber daya manusia, dan sumber daya alam lainnya secara efektif dan efisien.

Hakikat manajemen dalam Islam adalah al-tadbir (pengaturan)⁴⁰. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti firman Allah SWT:

³⁹ George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2000, *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A Ticoalu. Cet. Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1.

⁴⁰ Ramayulis, 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, hlm. .362

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” (QS. As-Sajdah: 5)⁴¹

Kandungan ayat di atas diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.⁴²

Kamus besar bahasa Indonesia, budaya (*cultural*) diartikan sebagai “pikiran; adat istiadat; sesuatu yang sudah berkembang; sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah”.⁴³

Menurut Edward B. Tylor sebagaimana dikutip Sulistyorini, budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴⁴ Sedangkan menurut

⁴¹ R. Soenarjo, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, Semarang: Karya Toha Putra, hlm.330.

⁴² M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-misbah*, vol: 10, (Jakarta: Lentera Hati), hlm.782.

⁴³ Tim Penyusun Kamus, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 169.

⁴⁴ Sulistyorini. 2009, *Manajemen Pendidikan Islam : Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Teras), hlm. 249

Koentjaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁴⁵

Menurut Morgan sebagaimana dikutip Supardi, budaya merupakan hasil interaksi antar individu yang ada dalam organisasi. interaksi antara satu dengan lainnya mereka memadukan kepercayaan, nilai, norma, dan cara berpikir yang akan membentuk budaya organisasi.⁴⁶ pengertian ini lebih membawa budaya sebagai pemersatu antar individu yang berbeda ke dalam sebuah organisasi.

Istilah dan konsep 'budaya' di dunia pendidikan berasal dari konsep budaya yang terdapat di dunia industri, yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia dan teori organisasi.⁴⁷

Kajian ini dikenal pertama kali di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1970-an. Di Indonesia, budaya organisasi mulai dikenal pada tahun 1990-an, saat banyak dibicarakan tentang konflik budaya, bagaimana mempertahankan budaya Indonesia serta pembudayaan nilai-nilai baru. Seiring dengan itu, para akademisi mulai mengkajinya dan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan.⁴⁸ Budaya

⁴⁵ Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.180

⁴⁶ Supardi, 2013, *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktiknya*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.1

⁴⁷ Moh. Pabundu Tika, 2006, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 150

⁴⁸ Moh. Pabundu Tika, 2006, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.150

organisasi terdiri dari kata budaya dan organisasi yang masing-masing memiliki pengertian sendiri.

Dewasa ini budaya diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok. Budaya tidak diartikan sebagai sebuah kata benda, kini lebih dimaknai sebagai sebuah kata kerja yang dihubungkan dengan kegiatan manusia.⁴⁹

Budaya adalah asumsi-asumsi dasar dan keyakinan-keyakinan di antara para anggota kelompok atau organisasi.⁵⁰ Sedangkan organisasi diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama secara jelas diatur siapa menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, arus komunikasi, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Jadi, organisasi adalah suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, dan badan-badan pemerintahan.⁵¹

Berdasarkan sudut pandang kebahasaan kata religius (agama) berasal dari kata *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio/relegare* (Latin), dan *dien* (Arab). Kata *religion* (bahasa Inggris) dan *religie* (bahasa Belanda) adalah berasal dari induk kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Latin "*religio*" dari akar kata "*relegare*" yang berarti

⁴⁹ Hikmat, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm.201.

⁵⁰ Nurkolis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm.200.

⁵¹ Nanang, 2011, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 71.

mengikat.⁵² Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.⁵³

Menurut Muhaimin, kata religius identik dengan kata agama, namun tidak lebih kepada keberagamaan. Menurutnya religius lebih melihat aspek yang di dalam lubuk hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena menafaskan intimitas jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas kedalam pribadi manusia.⁵⁴

Menurut Nurcholish Madjid, agama bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah. Agama, dengan kata lain, meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (ber-*akhlaq karimah*), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.⁵⁵

Berikut beberapa ahli yang mendefinisikan budaya religius,

⁵² Dadang Kahmad, 2002, *Sosiologi Agama*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm. 29

⁵³ Kementerian Pendidikan Nasional, 2013, *Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 54

⁵⁴ Muhaimin, 2004, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 288

⁵⁵ Roibin, 2009, *Relasi Agama & Budaya Masyarakat Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press), hlm. 75

antara lain:

- 1) Menurut Fathurrohman budaya religius adalah tradisi dalam lembaga pendidikan yang secara sadar maupun tidak ketika warga lembaga mengikuti tradisi yang telah tertanam tersebut sebenarnya warga lembaga pendidikan sudah melakukan ajaran agama.⁵⁶
- 2) Menurut Zuchdi: Budaya religius merupakan salah satu metode pendidikan nilai yang komprehensif karena dalam perwujudannya terdapat inkulnasi nilai, pemberian teladan dan penyiapan generasi muda agar dapat mandiri dengan mengajarkan dan memfasilitasi pembuatan keputusan-keputusan moral.⁵⁷
- 3) Budaya religius adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan berbentuk pengamalan nilai-nilai agama sebagai perwujudan dari implementasi ajaran agama itu sendiri.⁵⁸

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa religius merupakan serangkaian praktek perilaku yang berhubungan dengan kepercayaan yang dinyatakan dengan menjalankan agama secara menyeluruh atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.

⁵⁶ Muhammad Fathurrohman, 2015, *Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstualisasi Pendidikan Agama di Sekolah*, (Yogyakarta: Kalimedia) hlm. 51

⁵⁷ Darmiyati Zuchdi, 2008, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 22

⁵⁸ Rahman, Nazarudin, 2009, *Regulasi Pendidikan*, Pustaka Felicha, Yogyakarta, hlm.

b. Pendekatan Pengembangan Budaya Religius

Dalam upaya mengembangkan budaya religius di sekolah guru dapat melakukan pendekatan sebagai berikut:

1) Formal Struktural

Dalam pendekatan ini, penanaman dilakukan melalui kegiatan tatap muka formal. Kegiatan belajar mengajar resmi melalui pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun metode yang dapat digunakan dalam memberikan penanaman nilai keagamaan ada beberapa metode di antaranya, adalah:

- a) Metode ceramah, yaitu sebuah bentuk interaksi edukatif melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok siswa.
- b) Metode Tanya jawab, yaitu cara penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid memberikan jawaban, atau sebaliknya.
- c) Metode diskusi, yaitu metode di dalam mempelajari atau menyampaikan bahan pelajaran dengan jalan mendiskusikannya sehingga menimbulkan pengertian dan pemahaman. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang murid berpikir dan mengemukakan pendapat serta ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam satu masalah bersama.
- d) Metode latihan siap, yaitu metode interaksi edukatif yang dilaksanakan dengan jalan melatih murid terhadap bahan-

bahan yang diberikan. Penggunaannya biasanya pada bahan-bahan pelajaran yang bersifat motoris dan ketrampilan.

- e) Metode kerja kelompok, yaitu kelompok kerja dari kumpulan beberapa individu yang bersifat pedagogis yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik (kerja sama) antara individu serta saling percaya.
- f) Metode sosio drama dan bermain peran, yaitu metode mengajar dengan mendemonstrasikan cara bertingkah laku dalam hubungan sosial. Sedangkan bermain peranan menekankan kenyataan dimana para murid diikutsertakan dalam memainkan peranan dalam mendemonstrasikan masalah-masalah sosial.
- g) Metode system regu, yaitu metode mengajar dimana dua orang guru atau lebih bekerjasama mengajar sekelompok murid.
- h) Metode pemecahan masalah (Problem Solving), yaitu metode menyampaikan bahan pelajaran dengan mengajak dan memotivasi murid untuk memecahkan masalah dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar.
- i) Metode proyek/unit, yaitu metode mengajar dimana bahan pelajaran diorganisasikan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu keseluruhan yang bermakna dan mengandung suatu pokok masalah.
- j) Metode studi kasus, yaitu metode yang digunakan untuk mencari dan memecahkan masalah sehingga memberikan

pengalaman dalam pengambilan keputusan dan merangsang konseptualisasi yang didasarkan pada kasus individu maupun kelompok.⁵⁹

2) Formal non-struktural

Pendekatan ini dilakukan melalui proses penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran yang diberikan pada siswa, diantaranya melalui internalisasi nilai-nilai agama.⁶⁰

a) Keteladanan

Penanaman ini diberikan dalam wujud nyata amaliyah harian (akhlak dan ibadah) di lingkungan sekolah. Perilaku Islami di sekolah dapat dimulai dengan adanya keteladanan yang dilakukan oleh para guru, antara lain.⁶¹

- 1) Cara model pilihan pakaian setiap guru diharapkan memakai pakaian yang rapi mempertimbangkan aturan aurat terutama sekali saat mereka berada di lingkungan sekolah.
- 2) Tata cara pergaulan yang sopan mencerminkan sikap akhlakul karimah di kalangan guru atau antara guru dengan siswa.

⁵⁹ Basyirudin Usman, 2002, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers), hlm. 45

⁶⁰ Basyirudin Usman, 2002, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers), hlm. 46

⁶¹ Basyirudin Usman, 2002, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers), hlm. 50

- 3) Disiplin dengan waktu dan tata tertib yang ada, sehingga dapat menumbuhkan sikap hormat dari anak didik dan masyarakat.
- 4) Taat beribadah menjalankan syariat agama dan diharapkan terbiasa untuk memimpin upacara keagamaan bukan saja dilingkungan sekolah, tetapi juga diluar sekolah/ masyarakat.
- 5) Memiliki wawasan yang luas, sehingga dalam menghadapi heterogenitas paham dan golongan agama tidak bersikap sempit dan fanatik.

Setiap guru hendaknya menjadi pribadi- pribadi muslim yang memiliki kedalaman wawasan, ilmu, dihiasi tingkah laku akhlakul karimah yang patut menjadi panutan bagi siswa dan siswi. Kriteria tersebut tampaknya sesuai bila sekolah ingin menerapkan perilaku islami di sekolah tersebut.

b) Penerapan Pembiasaan

- 1) Penanaman ini dilakukan dengan adanya upaya pengembangan dalam tiga tataran, yaitu:
Tataran nilai yang dianut, pola aturan ini perlu dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang disepakati dan perlu dikembangkan di sekolah. Selanjutnya dibangun komitmen dan loyalitas bersama diantara semua warga sekolah terhadap nilai-nilai yang disepakati

2) Tataran praktik keseharian, pada tataran ini nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: Pertama, sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal, Kedua, penerapan action plan mingguan atau bulanan sebagai tahapan sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang telah disepakati tersebut.

Proses internalisasi nilai tersebut bermula dari moral knowing (mengetahui secara teoritik tentang moral), dilanjutkan dengan moral feeling (kesadaran penuh untuk berperilaku yang bermoral) dan diakhiri dengan moral action (melakukan segala tindakan yang mencerminkan perilaku moral yang baik). Proses tersebut dilakukan dengan metode internalisasi dengan teknik pembiasaan dan keteladanan.

c. Strategi Pengembangan Budaya Religius

Strategi yang dapat dilakukan guru dalam pengembangan budaya islami di lingkungan sekolah yakni:

1) People power

Strategi mengembangkan budaya islami di sekolah dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui *people's power*.⁶² *people power* disini adalah pemimpin lembaga pendidikan yakni kepala sekolah. Dengan segala kekuasaan dan kewenangannya kepala sekolah akan mengkondisikan sekolah agar berbudaya islami. Strategi ini dikembangkan melalui pendekatan perintah atau larangan. Jadi melalui peraturan sekolah akan membentuk sanksi dan reward pada warga sekolah sehingga warga sekolah secara tidak sadar akan membentuk suatu budaya, yang bila diarahkan ke religius akan tercipta budaya Islami.

2) Persuasive Strategi

Strategi dijalankan dengan pembentukan opini dan pandangan masyarakat atau warga pendidikan. strategi ini dapat dikembangkan melalui pembiasaan.⁶³ Misalnya membiasakan membaca Al Qur'an atau bahkan hafalan Surat Yasin.

3) Normative Educative

Normative adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi melalui norma itulah dikaitkan dengan pendidikan akan membentuk budaya religius di lembaga pendidikan. Strategi ketiga ini dapat dikembangkan melalui pendekatan persuasive, keteladanan atau mengajak warga sekolah secara halus dengan

⁶² Ngainun Naim (2012) *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*,(Yogyakarta: Ar Ruzz Media), hlm 131.

⁶³ Ngainun Naim (2012) *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*,(Yogyakarta: Ar Ruzz Media), hlm . 132

memberikan alasan memberikan prospek yang baik agar bisa meyakinkan mereka. Contohnya ialah mengajak warga sekolah untuk selalu shalat berjama'ah yakni dengan memberikan gambaran pahala dari shalat berjama'ah dan juga hal-hal positif tentang shalat berjama'ah agar warga sekolah yakin dan dapat melaksanakannya.⁶⁴

Hal tersebut merupakan bagian dari tarbiyah kepada anak sebagaimana pendapat dalam *al-Tarbiyah wa al-Thuruq al-Tadris* bahwasanya,

المدرسة هي الأداة التي تعمل مع الأسرة على تربية الطفل⁶⁵

“Madrasah merupakan sarana yang bekerjasama dengan keluarga untuk mendidik anak.”

Madrasah menjadi bagian dari upaya pembiasaan dalam melaksanakan shalat dhuhur berjamaah, atau kegiatan keagamaan lainnya sehingga akan menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada

⁶⁴ Ngainun Naim (2012) *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media), hlm. 133

⁶⁵ Sholeh Abdul Aziz, Abdul Aziz Abdul Majid, 2000, *al Tarbiyah wa al Thuruq al Tadris (Juz I)*, Mesir: Dar Al-Maarif, hlm.78.

mutu pendidikan, dilihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajad).⁶⁶

Menurut Oemar Hamalik, mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk-produk pendidikan yakni bahwa manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.⁶⁷ Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup *input*, *proses* dan *output* pendidikan.⁶⁸

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

⁶⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke- 10, hlm. 677.

⁶⁷ Oemar Hamalik, 2018, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet.ke-1, hlm. 33.

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional RI, 2002, *Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah), hlm. 7.

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.⁶⁹

Menurut Ahmad D. Marimba Pengertian pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁷⁰

Menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.⁷¹

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, Mutu pendidikan adalah kemampuan religius dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan religius sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut

⁶⁹ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 2

⁷⁰ Tafsir, 2005, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 12

⁷¹ Hikmat, 2009, *Manajemen Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 23

norma/ standar yang berlaku.⁷²

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh religius pada setiap kurun waktu tertentu.⁷³

Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolut dan relative. Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Bila diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya. Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*). Edward & Sallis dalam Nurkholis mengemukakan kualitas dalam konsep relative berhubungan

⁷² Dzaujak Ahmad, 2011, *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, Jakarta: Depdikbud, hlm.8.

⁷³ B. Suryosubroto, 2004, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 210-211.

dengan produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan.⁷⁴

b. Komponen Mutu Pendidikan

Mengenai mutu akademik ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 17 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 bahwa: Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai kriteria minimal standar nasional pendidikan ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana.

1) Standar Isi (Permendiknas No 22 Tahun 2006)

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menetapkan Standar Isi dan Standar Kompetensi dan dan kompetensi dasar.

2) Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas 23 Tahun 2006)

⁷⁴ Nurkholis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 68

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lampiran Permen ini meliputi: SKL Satuan Pendidikan & Kelompok Mata Pelajaran, SKL Mata Pelajaran SD-MI, SKL Mata Pelajaran SMP-MTs, SKL Mata Pelajaran SMA-MA, SKL Mata Pelajaran PLB ABDE, SKL Mata Pelajaran SMK-MAK.

3) Standar Proses (Permendiknas 41 Tahun 2007)

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 16 tahun 2007)

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

5) Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas No. 24 tahun 2007)

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku

dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6) Standar Pengelolaan Pendidikan (Permendiknas No 19 tahun 2007)

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh standar-standar: pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian. Permendiknas No 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7) Standar Pembiayaan (Permen No 69 Tahun 2009)

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8) Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas 20 Tahun 2007)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui standar tersebut meliputi Standar Isi,

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

Dalam kaitan itulah pada tahun anggaran 2006, BSNP telah mengembangkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan telah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Teori Peningkatan Mutu Pendidikan

Ada tiga teori peningkatan mutu, yaitu *The Total Quality Manajement (TQM) Organizing Business For Excelent* dan Model Peningkatan Mutu Faktor Empat. Uraian ketiga teori tersebut adalah:

1) *The Total Quality Manajement (TQM)*

Peningkatan mutu berkaitan dengan target yang harus dicapai proses untuk mencapai dan faktor-faktor yang terkait dalam peningkatan mutu ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian, yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses mencapai hasil tersebut teori manajemen mutu terpadu atau yang lebih dikenal dengan

Total Quality Management (TQM) akhir-akhir ini banyak diadopsi dan digunakan oleh dunia pendidikan dan teori ini dianggap sangat tepat dalam dunia pendidikan saat ini.⁷⁵

Menurut Sri Minarti *The Total Quality Manajement* (TQM) sangat populer di lingkungan organisasi profit, khususnya di lingkungan berbagai badan usaha/ perusahaan dan industri, yang telah terbukti keberhasilannya dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya masing-masing dalam kondisi bisnis yang kompetitif. Kondisi seperti ini telah mendorong berbagai pihak untuk mempraktikkannya di lingkungan organisasi non-profit, termasuk di lingkungan lembaga pendidikan.⁷⁶

The Total Quality Manajement (TQM) merupakan manajemen fungsional dan pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum (*public service*) dan pembangunan masyarakat (*community development*).

2) *Organizing Business For Excelent*

Teori *Organizing Business For Excelent* yang dikembangkan oleh Andrew Tani dalam Dwiningrum yang menjelaskan bahwa peningkatan mutu berawal dan dimulai dari

⁷⁵ Gasperz, Vincent. 2005, *Total Quality Management*. Gramedia, Jakarta, Hlm. 51

⁷⁶ Minarti, Sri. 2001, *Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. (Yogyakarta: Ar-Ruuz Media, hlm. 138

dirumuskannya visi sekolah. Dalam rumusan visi terkandung mutu sekolah yang diharapkan di masa mendatang. Visi sebagai gambaran masa depan dapat dijabarkan dalam wujud yang lebih kongkret dalam bentuk misi, yakni suatu *statement* yang menyatakan apa yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan gambaran masa depan menjadi realitas. Konsep misi mengandung dua aspek, yaitu aspek abstrak dan kongkret. Misi mengandung aspek dalam wujud perlunya kepemimpinan. Kepemimpinan yang hidup dalam suatu sekolah akan melahirkan kultur sekolah. Bagaimana sifat dan bentuk kultur sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dan kultur sekolah merupakan sisi abstrak dari konsep misi. Di pihak lain, misi mengandung sesuatu yang bersifat kongkret, yakni strategi dan program, yang dapat dirumuskan dalam rancangan yang tertulis. Strategi dan program berkaitan erat dengan infrastruktur sekolah, seperti keberadaan wakil kepala sekolah, wali kelas, komite sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang dibutuhkan.⁷⁷

3) Model Peningkatan Mutu Faktor Empat

Menurut Dwiningrum model Peningkatan Faktor Empat menjelaskan bahwa mutu merupakan hasil dari pengaruh langsung proses belajar-mengajar. Kualitas sekolah berawal dari adanya visi sekolah, yang kemudia dijabarkan dalam misi sekolah. Menurut

⁷⁷ Dwiningrum, Siti IrineAstuti. , 2015, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 96

teori eksekusi misi mengandung dua aspek, yaitu aspek abstrak dan kongkret. Misi mengandung nilai-nilai, seperti menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Lebih lanjut, nilai-nilai akan berpengaruh terhadap kultur sekolah. Di sisi lain, misi mengandung aspek kongkret, yakni berupa strategi dan program, yang menuntut keberadaan infrastruktur. Variabel yang lain adalah kepemimpinan dan manajerial yang menentukan kualitas proses belajar mengajar. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan yang merupakan kemampuan untuk menggerakkan, menanamkan, dan mempengaruhi aspek abstrak seperti membangkitkan semangat belajar di kalangan siswa, menanamkan visi pada warga sekolah, dan sebagainya, juga mengandung manajerial yang merupakan kemampuan kongkret dalam mengorganisir, mengeksekusi, memonitor, dan mengontrol. Jadi, pada “model empat” ini kualitas proses belajar mengajar ditentukan oleh kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial, infrastruktur.⁷⁸

b. Indikator Peningkatan Mutu

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan yaitu:

- 1) Hasil akhir pendidikan
- 2) Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga

⁷⁸ Dwiningrum, Siti IrineAstuti. , 2015, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 97

pendidikan. Misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.

- 3) Proses pendidikan
- 4) Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)
- 5) Raw input dan lingkungan.⁷⁹

Perspektif konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh religius pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain), dapat pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga atau seni. Bahkan prestasi religius dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang intangible seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan sebagainya.

Proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana religius dukungan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara

⁷⁹ Nurhasan, 2013, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21, Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi mutu Pendidikan*, Jakarta: PT. Sindo, hlm. 390

guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil output harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu tertentu. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil output yang ingin dicapai. Adapun instrumental input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa) seperti guru yang harus memiliki komitmen yang tinggi dan total serta kesadaran untuk berubah dan mau berubah untuk maju, menguasai bahan ajar dan metode mengajar yang tepat, kreatif, dengan ide dan gagasan baru tentang cara mengajar maupun materi ajar, membangun kinerja dan disiplin diri yang baik dan mempunyai sikap positif dan antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau diajar dan mau belajar.

Sarana dan prasarana belajar harus tersedia dalam kondisi layak pakai, bervariasi sesuai kebutuhan, alat peraga sesuai dengan kebutuhan, media belajar disiapkan sesuai kebutuhan. Biaya pendidikan dengan sumber dana, budgeting, kontrol dengan pembukuan yang jelas. Kurikulum yang memuat pokok-pokok materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, realistik, sesuai dengan

fenomena kehidupan yang sedang dihadapi. Tidak kalah penting metode mengajar pun harus dipilih secara variatif, disesuaikan dengan keadaan, artinya guru harus menguasai berbagai metode. Begitu pula dengan raw input dan lingkungan, yaitu siswa itu sendiri. Dukungan orang tua dalam hal ini memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan, selalu mengingatkan belajar anak di rumah maupun di sekolah.

c. Ruang Lingkup Manajemen Mutu Pendidikan

Manajemen mutu pendidikan tidak lepas dari tiga model yaitu: input, proses dan output. Dalam usaha peningkatan mutu dengan menggunakan model ini, ada beberapa kriteria dan karakteristik religius yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a) Input Pendidikan

Input pendidikan meliputi aspek sebagai berikut:

- 1) Memiliki kebijakan mutu.
- 2) Sumber daya tersedia dan siap.
- 3) memiliki harapan prestasi tinggi.
- 4) Fokus pada pelanggan (khususnya peserta didik).
- 5) Input manajemen

b) Proses dalam Pendidikan

- 1) Efektifitas Proses belajar Mengajar Tinggi
- 2) Kepemimpinan yang Kuat
- 3) Pengelolaan yang Efektif Tenaga Kependidikan

- 4) Memiliki Budaya Mutu Religius
 - 5) Religius Memiliki Team Work yang Kompak, Cerdas, dan Dinamis
 - 6) Religius Memiliki Kewenangan (Kemandirian)
 - 7) Partisipasi Warga Religius dan Masyarakat
 - 8) Religius Memiliki Keterbukaan (Transparasi) Manajemen
 - 9) Religius Memiliki Kemauan untuk Berubah (Psikologis dan Fisik)
 - 10) Religius Melakukan Evaluasi dan Perbaikan secara Berkelanjutan
 - 11) Religius Responsif dan Antisipatif terhadap Kebutuhan
 - 12) Religius memiliki Akuntabilitas
 - 13) Religius Memiliki Sustainabilitas
- c) Output yang diharapkan.

Religius memiliki output yang diharapkan. Output adalah kinerja sekolah. Kinerja religius adalah prestasi yang dihasilkan dari proses sekolah. Kinerja religius diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya.⁸⁰

d. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Ada beberapa strategi dalam mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam baik berupa pesantren, madrasah atau

⁸⁰ Departemen Pendidikan Nasional RI, 2002, *Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah), hlm. 11

sekolah, yaitu⁸¹:

- 1) Merumuskan visi, misi dan tujuan lembaga yang jelas, serta berusaha keras mewujudkannya melalui kegiatan riil sehari-hari.
 - a) Membangun kepemimpinan yang benar-benar profesional (terlepas dari intervensi ideologi, politik, organisasi, dan mazhab dalam menempuh kebijakan lembaga).
 - b) Menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan peserta didiknya.
 - c) Menyempurnakan strategi rekrutmen siswa secara proaktif dengan "menjemput" bahkan "mengejar bola".
 - d) Berusaha keras untuk memberi kesadaran pada para siswa bahwa belajar merupakan kewajiban paling mendasar yang menentukan masa depan mereka.
 - e) Menggali strategi pembelajaran yang dapat mengakselerasi kemampuan siswa yang masih rendah menjadi lulusan yang kompetitif.
 - f) Menggali sumber-sumber keuangan nonkonvensional dan mengembangkannya secara produktif.
 - g) Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan proses pembelajaran, terutama ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium.

⁸¹ Mujamil Qomar, 2007, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 55-57

- h) Mengorientasikan strategi pembelajaran pada tradisi pengembangan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan.
- i) Memperkuat metodologi baik dalam hal pembelajaran, pemikiran maupun penelitian.
- j) Mengkondisikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menstimulasi belajar.
- k) Mengkondisikan lingkungan yang islami baik dalam beribadah, bekerja, pergaulan sosial, maupun kebersihan
- l) Berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai di atas rata-rata kesejahteraan pegawai lembaga pendidikan lain.
- m) Mewujudkan etos kerja yang tinggi di kalangan pegawai melalui kontrak moral dan kontrak kerja
- n) Berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada siapapun, baik jajaran pimpinan, guru, karyawan, siswa maupun tamu serta masyarakat luas.
- o) Meningkatkan promosi untuk membangun citra (image building)
- p) Memublikasikan kualitas proses dan hasil pembelajaran kepada publik secara terbuka.
- q) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang menguntungkan, baik secara finansial maupun sosial.
- r) Menjalin hubungan erat dengan masyarakat untuk mendapat dukungan secara maksimal.
- s) Beradaptasi dengan budaya lokal dan kebhinekaan.

- t) Menyingkronkan kebijakan – kebijakan lembaga dengan kebijakan - kebijakan pendidikan nasional.

4. Manejemen budaya religius dalam peningkatan mutu pendidikan

Budaya memiliki kaitan erat dengan persepsi terhadap nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Budaya bisa diartikan hasil dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan serta proses seleksi atau menerima bahkan menolak norma-norma yang ada dalam cara dirinya berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan tertentu. Sesuai dengan pernyataan Geert Hofstede bahwa budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individual pada lingkungannya.⁸² Definisi ini mengandung makna bahwa kita melihat budaya dalam perilaku sehari-hari, tetapi dikontrol oleh mental program yang ditanamkan sangat dalam. Budaya bukan hanya perilaku dipermukaan, tetapi sangat dalam diri kita masing-masing.

Depdiknas mendefinisikan makna mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dan secara khusus, mutu dalam konteks pendidikan mencakup mutu input, proses, dan out pendidikan.⁸³ Berikut standar mutu relatif yang

⁸² Wibowo, *Budaya Organisasi; Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 15.

⁸³ Depdiknas, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Dir. PLP, 2005), hlm. 6.

dirumuskan oleh Edward Sallis, antara lain;⁸⁴ (1) Standar produk dan jasa yang meliputi kesesuaian dengan spesifikasi, kesesuaian dengan tujuan dan manfaat, tanpa cacat (zero defects) dan selalu baik sejak awal, (2) Standar pelanggan terdiri dari kepuasan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan dan menyenangkan pelanggan.

Depdiknas mengemukakan paradigma mutu dalam konteks pendidikan, mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan. Lebih jauh dijelaskan bahwa *input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, yang dimaksud sesuatu adalah berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi keberlangsungan proses.

Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (seperti ketua, dosen, konselor, peserta didik) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang bahan-bahan, dan sebagainya). Sedangkan *input* perangkat meliputi: struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan lain sebagainya. *Input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya mutu *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan input, makin tinggi kesiapan *input*, makin tinggi pula mutu *input* tersebut. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input

⁸⁴ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education*, alih bahasa Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurozi (Jogjakarta: IRCiSoD, 2007), hlm. 57.

dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.⁸⁵

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, Mutu pendidikan adalah kemampuan religius dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan religius sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.⁸⁶

Dwiningrum menjelaskan manajemen peningkatan mutu akademik adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan faktor-faktor yang berkaitan, dengan tujuan agar yang menjadi target pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.⁸⁷

Fatah Manajemen peningkatan mutu adalah serangkaian proses atau metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sebuah lembaga, mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif & kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen lembaga untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan

⁸⁵ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku1, Konsep dan Pelaksanaan* (Jakarta. Balitbang. Depdiknas, 2001), hlm. 4.

⁸⁶ Dzaujak Ahmad, 2011, *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, Jakarta: Depdikbud, hlm.8.

⁸⁷ Dwiningrum, Siti IrineAstuti. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 65

organisasi sebuah lembaga guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (peserta didik dan masyarakat dalam dunia pendidikan).⁸⁸

Budaya dan mutu pendidikan saling ada keterkaitan karena dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak akan tercapai jika kebiasaan-kebiasaan yang mendukung mutu tidak dilaksanakan, kebiasaan tersebutlah yang disebut budaya. Budaya religius yang dilaksanakan tentu akan mempengaruhi terhadap mutu pendidikan karena akan berulang-ulang dilakukan dalam jangka waktu panjang dan berkelanjutan dalam sebuah tatanan manajemen.

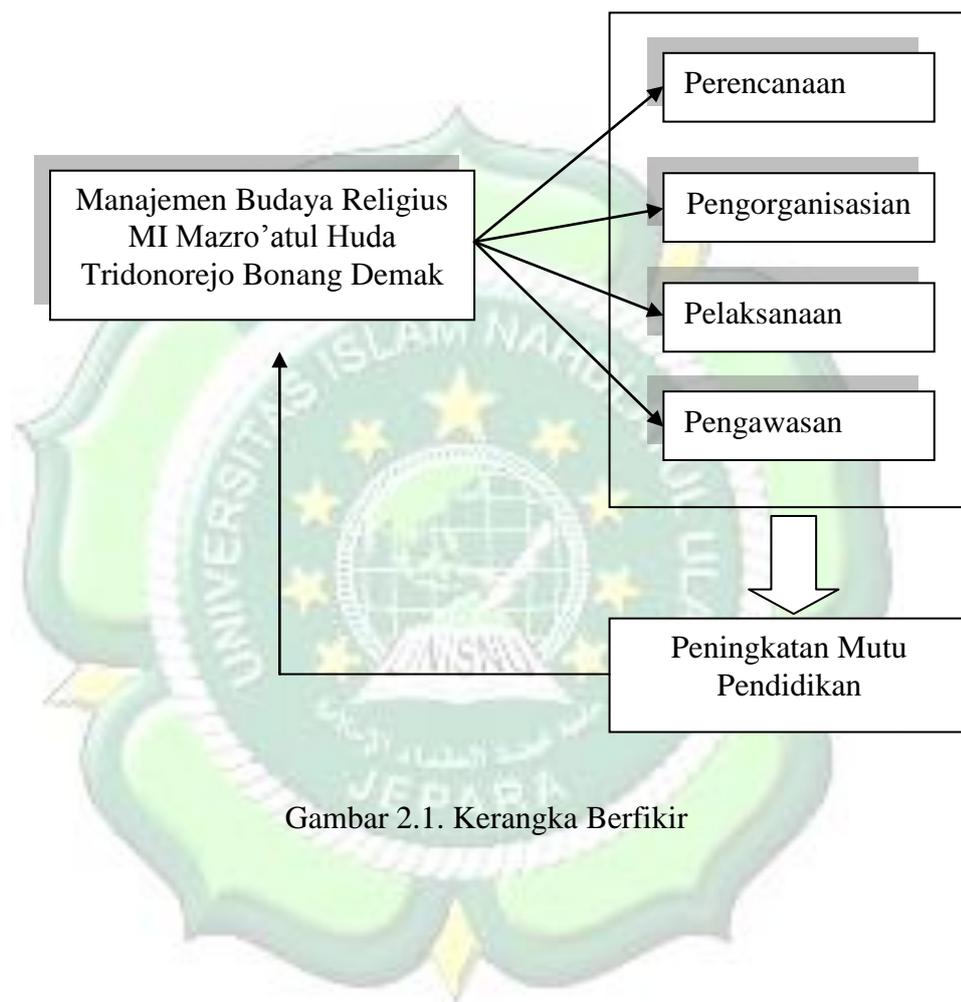
B. Kerangka Berfikir

Madrasah Ibtidaiyah Mazro'atul Huda Tridonorejo Bonang Demak terus meningkatkan mutu pendidikan di berbagai aspek yang salah satu adalah melalui budaya religius Islami. Peningkatan mutu pendidikan yang terfokus pada budaya religius ini penting sekali mengingat Madrasah Ibtidaiyah Mazro'atul Huda merupakan sekolah dasar setara SD yang berbasis Agama Islam. Peran dan kiprahnya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui budaya mutu menjadi tuntutan masyarakat yang tak bisa ditolak lagi.

Manajemen budaya religius menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan karena dengan manajemen yang baik akan berdampak terhadap hasil itu sendiri. Manajemen yang diterapkan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

⁸⁸ Fatah, Nanang. 2013. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 22

Melalui manajemen yang baik dalam pelaksanaan budaya religius diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Mazro'atul Huda Tridonorejo Bonang Demak.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir